

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Edited by Nurainun Mangunsong. Bandung: Nusa Media, 1971.
- Iswahyudi, Fauzi. *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Edited by Erwin Asmadi. Medan: Enam Media, 2020. b.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Edited by Uji Prastya. 1st ed. Jakarta: PT Kanisius, 2007.
- Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan. Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan Ilmu Perundang-Undangan*. Vol. 4. Makassar: Kereta Kupa, 2017. <https://osf.io/preprints/inarxiv/5r6fp/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Putranto, Rahmat Dwi. *Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum Di Dunia Digital*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2023.
- Rijadi, Jonaedi Efendi dan Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana, 2016. books.google.co.id.
- S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Penyusunan*. Edited by Uji Prastya. Jakarta: PT Kanisius, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002. <https://inlislite.uin-suska.ac.id>.

- Susmayanti, Riana. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://books.google.co.id/books>.
- Tajuddin, Muhammad. *Digitalisasi Konsep, Teknologi, Dan Penerapannya*. Edited by Adam Bachtiar. 1st ed. Malang: MNC Publishing, 2022. <http://repository.universitasbumigora.ac.id>.
- Wibowo, Agus. *Hukum Di Era Globalisasi Digital*. Edited by Joseph Teguh Santoso. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023. <https://digilib.stekom.ac.id>.

B. Jurnal

- Adrie, and I Ketut Suardita. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): Hal. 66. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1196>.
- Ainul, Badri. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): Hal. 3.
- AR, Andi Bau Inggit. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Principles." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2020): Hal. 8-10.
- Asiva Noor Rachmayani. *Efektivitas Hukum*, 2015. <https://ejournal.stai-br.ac.id>.
- Bangun, Happy Andi Wisata. "Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kota Binjai," 2024, Hal. 41. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3425>.
- Bari, F, and H Heriyanto. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan ...*, no. 2 (2024): Hal. 321. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/625%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/625/1003>.
- Budiman, M. Arief. "Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-" 2, no. April (2021): Hal. 280
- Dianisa, Tifani Rizki, and Gayatri Dyah Suprobowati. "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di

Indonesia.” : : *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): Hal. 300.

Fatimah, Siti. “Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): Hal. 174. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/325%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/325/311>.

Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): Hal. 700. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.

Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): Hal. 124. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

Kronblad, Charlotta, Johanna E. Pregmark, and Rita Berggren. “Difficulties to Digitalize: Ambidexterity Challenges in Law Firms.” *Journal of Service Theory and Practice* 33, no. 2 (2023): Hal. 217. <https://doi.org/10.1108/JSTP-05-2022-0120>.

Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): Hal. 547.

Mardialamsyah, Syamsir, and Meri Yarni. “Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Daerah Periode 2019-2024.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): Hal. 28.

Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, and Sekar Fuad Maharany. “Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): Hal. 168. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>.

Rais, M. Tasbir. “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): Hal. 1. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

Ripaldi, Riyan, and Ridham Priskap. “Analisis Yuridis Kewenangan Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): Hal. 182. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.20346>.

Solahudin, Desty Stephany, Novie Indrawati Sagita, and Jajang Sutisna. “Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung.” *JANITRA : Jurnal Administrasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2022): Hal. 404.

Sukma Faradiba, Slamet Muchsin & Hayat. “Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang” 2, no. 1 (2021): Hal. 278.

Tanggono, Claustantianus Wibisono, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas Di Pemerintah Daerah.” *Jurnal Juridisch* 1, no. 1 (2023): Hal. 223-225.

Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. “Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah.” *Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): Hal. 232. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1614/pdf>.

Yusdheaputra, Wafa. “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): Hal. 200. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>.

Yusuf, Mohd., Sugianto, Roland Latarsa Pangaribuan, Andi Whayu Putra Utama, and Geofani Milthree Saragih. “Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat.” *JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): Hal. 6. <http://jurnal.intancendekia.org/index.php/JPIn/article/view/369>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14)

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Fungsi Sekretariat, Asisten, Bagian dan Rincian Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi. (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 39)

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 40).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Perda.

D. Skripsi

Ayesha, Fernanda. "Inovasi Layanan Kepegawaian Berbasis E-Government Melalui Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen ASN (SIGMA) Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau," 2024.

Firdaus, Idos. "Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang," 2019. <http://eprints.untirta.ac.id/1438/>.

E. Website

"[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/](http://Digilib.Unila.Ac.Id/)," (Diakses Pada 11 Januari 2025).

"[Http://Eperda.Kemendagri.Go.Id/](http://Eperda.Kemendagri.Go.Id/)," n.d. (Diakses Pada 11 Januari 2025)

"[Http://Eperda.Kemendagri.Go.Id/Berita/Detail_Berita/81200/](http://Eperda.Kemendagri.Go.Id/Berita/Detail_Berita/81200/)," n.d. (Diakses Pada 11 Januari 2025)

"[Https://inlislite.uin-suska.ac.id/](https://inlislite.uin-suska.ac.id/)," (Diakses Pada 29 Mei 2025)

"[Https://Jdih.Jambikota.Go.Id/](https://Jdih.Jambikota.Go.Id/)," n.d. (Diakses Pada 11 Januari 2025)

"[Https://Ula.Kemendagri.Go.Id/](https://Ula.Kemendagri.Go.Id/)," n.d. (Diakses Pada 01 Maret 2025)

"[Https://Www.Hukumonline.Com/](https://Www.Hukumonline.Com/)," n.d. (Diakses Pada 20 Agustus 2024)

"[Https://Www.Komdigi.Go.Id/Berita/](https://Www.Komdigi.Go.Id/Berita/)," n.d. (Diakses Pada 11 Januari 2025)